

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR

Oleh:  
**Bachtiar**  
Universitas Pejuang Republik Indonesia

## Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar di kawasan Makassar Mall Kecamatan Wajo kota Makassar dan untuk menjelaskan faktor-faktor determinan yakni faktor komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana kebijakan baik aparat pemerintah kota/instansi terkait maupun pedagang kaki lima sendiri serta struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pedagang kaki lima yang beroperasi di Makassar Mall Kecamatan Wajo khususnya yang resmi tercatat pada Dinas Pasar Kota Makassar. Sampel yang ditetapkan dari populasi menggunakan teknik *Cluster Sampling* (sampel gugus bertahap). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, kuesioner terstruktur wawancara, dokumentasi. Data yang terkumpul dari hasil penelitian, akan diseleksi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif-kuantitatif.

Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima sudah tergolong cukup berhasil dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya. Secara umum faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap pemerintah kota serta sikap pedagang kaki lima mempunyai pengaruh secara determinan tergolong sudah cukup mendukung terhadap berhasilnya implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang dilaksanakan pemerintah kota dalam wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar. Meskipun masih relatif terbatas sumber dana operasional dan fasilitas pelayanan publik yang dimiliki pemerintah kota untuk melaksanakan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan.

**Kata kunci: Kebijakan; Pedagang Kaki Lima.**

## PENDAHULUAN

Salah satu bidang usaha sektor informal yang signifikan untuk dibahas adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan satu dari sekian banyak sektor informal yang ada di Kota Makassar. Munculnya pedagang kaki lima ini menimbulkan banyak masalah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi keberadaan pedagang kaki lima ini merupakan solusi bagi masyarakat pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan dan berdasarkan beberapa hasil penelitian, komunitas pedagang kaki lima merupakan tempat berkumpulnya para kaum miskin perkotaan.

Berpedoman pada Perda nomor 10 tahun 1990 inilah maka pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pemerintah kecamatan, Dinas Pasar dan Satpol PP kota Makassar melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang menempati ruang publik (*public space*) untuk berjualan dan

**Oleh: Bactiar**

hal inilah yang terjadi pada beberapa komunitas pedagang kaki lima yang beberapa waktu lalu digusur seperti PKL di pintu II UNHAS, komunitas PKL penjual buah sepanjang jalan perintis kemerdekaan, komunitas PKL Perumnas Antang dan banyak lagi lainnya yang telah ditertibkan karena melanggar Perda nomor 10 tahun 1990.

Dari beberapa komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota Makassar, salah satunya adalah komunitas pedagang kaki lima Makassar Mall. Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan perdagangan Makassar Mall yang terletak di jantung Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo. Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Makassar Mall sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya. Mereka menempati emperan toko di sepanjang kawasan Makassar Mall, jenis dagangannya bermacam-macam mulai dari makanan, minuman sampai dengan pakaian. Pada umumnya mereka berasal dari daerah-daerah yang ada di sekitar kawasan perdagangan Makassar Mall.

Guna mengimplementasikan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima ini yang dilakukan pemerintah Kota Makassar secara efektif di lapangan dengan berdasar pada Perda kotamadya tingkat II Ujung Pandang nomor 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang jumlahnya cukup banyak tersebar secara meluas di beberapa kecamatan/kelurahan di wilayah kota ini, sehingga pemerintah kota (Walikota) menganggap penting untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada Camat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 01 Tahun 2002. Hal ini membantu pemerintah kota melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima di wilayahnya masing-masing. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan, maka Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat dan Tidak Dapat Digunakan Oleh Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan aktifitas usahanya dalam wilayah kota Makassar. Dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Camat Wajo telah menunjuk dan menetapkan lokasi konsentrasi tempat usaha bagi bagi pedagang kaki lima tersebut sebagai upaya untuk melokalisir / merelokasi tempat usahanya di kawasan Makassar Mall.

Permasalahan-permasalahan dan kewenangan yang diuraikan di atas merupakan tanggungjawab dari pemerintah kota Makassar dalam hal ini instansi-instansi yang terkait, diantaranya Dinas Pasar dan Satpol PP serta pemerintah Kecamatan Wajo. Sebagai wujud tanggungjawab tersebut maka instansi pemerintah tersebut mencoba mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pada kenyataannya jika pelaksanaan peraturan daerah tersebut dihubungkan dengan cita-cita pembentukannya, maka dapat digolongkan dengan cukup terealisasi dengan baik namun belum maksimal, hal ini disebabkan adanya permasalahan dalam proses implementasi kebijakan tersebut mulai dari intensitas dan pemahaman para PKL terhadap penyuluhan dan pembimbingan yang

diberikan mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pedagang kaki lima, penataan tempat dan waktu berusaha bagi para PKL dan masalah penataan perizinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam penerapan Perda kotamadya tingkat II Ujung Pandang nomor 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Wajo Kota Makassar dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Wajo Kota Makassar?.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut Salusu (2000:165), Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, “ambil pekerjaan dan laksanakan”. Suatu defenisi yang amat sederhana karena hanya berbentuk suatu istilah, tetapi kata “laksanakan” memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan. Demikian pula kata “kerjakan” memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Van Meyer dan Van Horn dalam Solichin (1997:64) menyatakan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Jones dalam Davey (1998:170) mengungkapkan bahwa Kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk menciptakan tujuan tertentu oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan juga merupakan suatu usulan arah tindakan yang ditujukan untuk seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran.

### **Kebijakan Pembangunan Perkotaan**

Menurut Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab (1997 : 4) kebijaksanaan publik diartikan bila pemerintah memilih melakukan sesuatu masalah maka harus ada tujuan (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu meliputi “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijaksanaan negara hal ini disebabkan karena : “Sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah akan mempunyai dampak pengaruh yang sama dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

### **Konsep Sektor Informal**

Menurut Budiardjo (1993:38) dikatakan bahwa pada hakikatnya marjinalitas di kota seperti permukiman marjinal, transportasi marjinal, dan ekonomi marjinal termasuk kategori sektor informal. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (Budiardjo, 1993:39) sektor informal dikelompokkan dan sub sektor ekonomi sebagai berikut: 1) Perdagangan (menetap dan keliling); 2) Jasa-jasa (tukang cukur, pembantu rumah tangga, bidan, guru agama, tukang reparasi, dan lain-lain); 3) Bangunan (buruh, tukang batu, mandor dan lain-lain); 4) Angkutan (supir, kernet, tukang becak); dan 5) Industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat).

Dari pendapat pertama di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup sektor informal sangat luas, sub sektor perdagangan ditempatkan pada urutan pertama karena mudah dikenal dan dinilai sejauh mana kualifikasi sektor ini sekaligus berbagai akibat yang ditimbulkannya pada sub sektor lainnya sedangkan pendapat kedua tentang ciri-ciri sosok sektor informal di atas memberi suatu kejelasan kepada kita bahwa kegiatan sektor tersebut saat ini sangat banyak digeluti oleh banyak masyarakat perkotaan. Dalam penelitian ini sengaja lebih dititikberatkan pada sub sektor perdagangan yakni PKL yang menurut penyusun sangat representatif.

### **Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir (1977:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pedagang kaki lima yang beroperasi di Makassar Mall kecamatan Wajo khususnya yang resmi tercatat pada Dinas Pasar kota Makassar. Sampel yang ditetapkan dari populasi menggunakan teknik Cluster Sampling (sampel gugus bertahap), Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :Observasi, Kuesioner terstruktur Wawancara, Dokumentasi,

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, akan diseleksi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif-kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif dimaksudkan untuk memperoleh penggambaran dari berbagai macam data sesuai dengan variabel-variabel atau indikator yang telah ditentukan dan dijelaskan dalam kalimat untuk selanjutnya ditabulasikan melalui teknik perhitungan statistik sederhana dengan berpedoman pada skala Likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi kebijakan penyuluhan dan pembimbingan

Tabel 1.

Tanggapan responden terhadap tingkat efektifitas pelaksanaan program penyuluhan

No	Jawaban	F	Bobot	Persentase	Mean Score
1.	Efektif	17	5	11,33	0,56
2.	Cukup Efektif	62	4	41,33	1,65
3.	Kurang Efektif	52	3	34,66	1,04
4.	Tidak Efektif	14	2	9,33	0,18
5.	Sangat Tidak Efektif	5	1	3,33	0,03
<b>J u m l a h</b>		<b>150</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
<b>Total Mean Score</b>					<b>3,46</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap tingkat efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian penyuluhan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah kota dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal masih dikategorikan cukup efektif pelaksanaannya dengan nilai rata-rata skor 3,46.

### Implementasi kebijakan penataan tempat dan waktu berusaha

Tabel 2.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah kota dalam penataan tempat usaha pedagang kaki lima

No	I n d i k a t o r	(F)	(S x F)	Rata-rata Skor
1	Tingkat efektifitas pelaksanaan lokalisasi/relokasi tempat usaha.	150	538	3,59
2	Tingkat efektifitas pelaksanaan pengaturan bangunan tempat usaha.	150	514	3,43
3	Pemilihan lokasi tempat usaha yang strategis.	150	621	4,14
4	Tingkat kelayakan bangunan tempat usaha.	150	445	2,97
5	Keadaan lingkungan tempat usaha dari aspek kebersihan, keindahan dan kemacetan lalu lintas.	150	543	3,62
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>150</b>	<b>532</b>	<b>3,55</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2020

Oleh: Bactiar

Data yang disajikan pada tabel 2 di atas, memperlihatkan suatu kondisi pelaksanaan program melokalisir/merelokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota dibantu Camat dan Lurah di kawasan Makassar Mall. Menurut penilaian responden yang didasarkan pada kategorisasi tanggapannya menunjukkan rata-rata skor 3,59. Hal ini berarti bahwa sudah cukup efektif pelaksanaan program lokalisasi/relokasi tempat usaha mereka di kawasan jalan yang dimaksud.

### Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Pembinaan PKL

Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.  
Pengaruh faktor komunikasi pemerintah kota  
dalam mendukung implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima

No	Indikator	(F)	(S x F)	Rata-rata Skor
1	Tingkat dukungan pelaksanaan koordinasi.	150	549	3,66
2	Tingkat dukungan pelaksanaan kerja sama.	150	537	3,58
3	Tingkat dukungan pelaksanaan sosialisasi peraturan pembinaan.	150	503	3,35
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>150</b>	<b>529</b>	<b>3,53</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2020

Melihat data yang tertera pada tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa indikator tingkat dukungan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima ini di lapangan, yang tergolong pelaksanaannya sudah cukup mendukung sesuai dengan kategorisasi tanggapan responden yang menunjukkan rata-rata skor 3,66. Pengaruh faktor sumber daya terhadap implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 4.  
Pengaruh faktor sumber daya pemerintah kota  
dalam mendukung implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima

No	Indikator	(F)	(S x F)	Rata-rata Skor
1	Tingkat dukungan sumber daya manusia (SDM).	150	522	3,48
2	Tingkat dukungan dana operasional.	150	504	3,36
3	Tingkat dukungan fasilitas pelayanan publik.	150	490	3,27
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>150</b>	<b>505</b>	<b>3,37</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2020

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, memperlihatkan penilaian responden terhadap indikator tingkat dukungan sumber daya manusia (SDM) menurut kategorisasi tanggapannya yang menunjukkan rata-rata skor 3,48. Penilaian responden ini berarti bahwa sudah cukup mendukung sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah kota sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penilaian mereka didasarkan pada segi kuantitas SDM yang jumlahnya relatif cukup banyak dimiliki pemerintah kota dan kecamatan / kelurahan termasuk jumlah SDM yang dimiliki instansi teknis terkait yang secara fungsional terlibat dalam pembinaan pedagang kaki lima ini. Pengaruh faktor sikap para pelaksana terhadap implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 5.  
 Pengaruh faktor sikap pemerintah kota dalam mendukung implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima

No	Indikator	(F)	(S x F)	Rata-rata Skor
1	Tingkat dukungan sikap komitmen Pemkot.	150	498	3,32
2	Tingkat dukungan sikap konsisten Pemkot.	150	506	3,37
3	Tingkat dukungan sikap ketegasan Pemkot.	150	511	3,41
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>150</b>	<b>506</b>	<b>3,37</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2020

Data yang disajikan pada tabel 5 di atas, memperlihatkan penilaian responden yang menunjukkan bahwa sikap komitmen pemerintah kota masih kurang mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan kategorisasi tanggapan responden yang menunjukkan rata-rata skor 3,32. Penilaian responden tersebut didasarkan pada sikap pemerintah kota sendiri yang kurang memperhatikan secara serius nasib pedagang kaki lima yang menggunakan pelataran atau daerah milik jalan sebagai tempat berusaha. Pengaruh faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 6.  
 Pengaruh faktor struktur birokrasi pemerintah kota dalam mendukung implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima

No	Indikator	(F)	(S x F)	Rata-rata Skor
1	Tingkat dukungan pendelegasian wewenang pada setiap tingkatan pemerintahan kota.	150	549	3,66
2	Tingkat dukungan prosedur kerja dalam memberikan pelayanan pada setiap tingkatan pemerintahan kota.	150	536	3,57
3	Tingkat dukungan kepemimpinan pada setiap tingkatan pemerintahan kota.	150	512	3,41
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>150</b>	<b>532</b>	<b>3,55</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2020

Data yang disajikan pada tabel 6. di atas, memperlihatkan penilaian responden terhadap pengukuran indikator pendelegasian wewenang tergolong cukup mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan, yang didasarkan pada kategorisasi tanggapan responden dengan rata-rata skor 3,66.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wajo Kota Makassar yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima sudah tergolong cukup berhasil dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya baik usaha jualan makanan dan minuman maupun jualan non makanan dan minuman di kawasan Makassar Mall di wilayah kecamatan Wajo kota Makassar. Meskipun relatif masih kurang efektif pelaksanaan kebijakan pemberian penyuluhan dan pembimbingan. Hal ini telah berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan bersih pedagang kaki lima dan peningkatan / kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya di lapangan serta peningkatan kesadaran mereka untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban lalu lintas di sekitar tempat usahanya secara bertahap.
2. Secara umum faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap pemerintah kota serta sikap pedagang kaki lima mempunyai pengaruh secara determinan tergolong sudah cukup mendukung terhadap berhasilnya implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang dilaksanakan pemerintah kota dalam wilayah kecamatan Wajo kota Makassar. Meskipun masih relatif terbatas sumber dana operasional dan fasilitas pelayanan publik yang dimiliki pemerintah kota untuk melaksanakan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukur. 1985. *Birokrasi dan Pembangunan Nasional; studi tentang peranan birokrasi lokal dalam implementasi program-program pembangunan di Sul-Sel*, Disertasi, tidak dipublikasikan, PPS Unhas, Ujung Pandang.
- Abdullah, Syukur. 1986. *Perkembangan dan Perencanaan Studi Implementasi*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Negeri.
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.

- An-nat, B.1983. *Implementasi Kebijakan Penanganan PKL: Studi kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta*. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM 1995.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Kecamatan Wajo Dalam Angka*. BPS Kota Makassar. Makassar.
- Bintoro, R. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta Ghalia.
- Branch, C. Metville. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Jakarta: Grada Univ Press.
- Budiardjo, E. 1993. *Kota Berwawasan Marketing*. Bandung: Alumni.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia III*, Jakarta: Gramedia.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: Alumni.
- Davey K.J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: U.I. Press.
- Hart, K., 1973, *Sektor Informal dan Pengangguran di Kota*, Gramedia, Yogyakarta.
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Karafir, Y.P. 1977. *Pemupukan Modal PKL, Seri penerbitan FIS-UI bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu*. Jakarta.
- Koestoer, R.H.1996. *Penduduk dan Akseibilitas Kota*. Jakarta: UI Press.
- Kunarjo, 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. JakartaL: U.I. Press.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Salusu J. 2000. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. 1991. *Hubungan antara Pemilihan Lokasi dengan Keberhasilan Usaha PKL di kota Jember*, Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Jember, No. 8 Seri A.
- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supertono dan Rusdianto. 2002. *Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Raya Pamulang Cideru*. Universitas Terbuka: Tangerang.
- Supriatna, T., 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suradinata, Ermaya. 1994. *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*. Bandung: Ramadhan.
- Syamsu Ibnu. 1994. *Kebijakan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan*, Fisip UGM, Yogyakarta.